

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan dalam menganalisis perbandingan Piagam *Board of Peace* dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif dengan meninjau perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena *Board of Peace* yang menjadi badan penyelenggara yang berwenang dalam upaya perdamaian dan krisis di Gaza atas konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina. Peneliti menemukan adanya implikasi, khususnya terkait relevansi akan eksistensi *Board of Peace* dengan prinsip politik luar negeri dan konstitusi Indonesia, sebab Indonesia telah menyatakan keanggotaannya dalam badan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan jenis normatif atau doktrinal dengan sifat penelitian normatif-deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan ini disusun dengan berdasarkan sumber atau jenis data sekunder. Jenis data sekunder ini terdiri dari tiga bahan hukum utama, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, Data kemudian dikumpulkan melalui mekanisme studi kepustakaan dan dianalisis melalui metodologi interpretasi hukum. Analisis ini kemudian membawa hasil penelitian yang terdiri dari pemahaman sistematis tentang komparasi dan relevansi normatif antara objek hukum yang diteliti, yaitu Piagam *Board of Peace* dan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Komparasi dilakukan dengan membandingkan kedua objek hukum yang dianalisis, lalu menganalisis kelemahan dan kekurangan dari kedua objek hukum tersebut. Sedangkan relevansi dilakukan dengan menganalisis hubungan piagam *Board of Peace* dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta menganalisis implikasi keikutsertaan Indonesia dalam *Board of Peace* berdasarkan konstitusi tersebut.

Kata Kunci: *Board of Peace*, Prinsip Bebas Aktif, Hukum Internasional, Konstitusi Indonesia

ABSTRACT

This study aims to analyze the comparison between the Board of Peace Charter and Indonesia's "independent and active" foreign policy principle, viewed through the perspective of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The research is motivated by the emergence of the Board of Peace as an organizing body authorized to address peace efforts and the crisis in Gaza arising from the Israel-Palestine conflict. The researcher identifies significant implications—particularly regarding the relevance of the Board of Peace's existence to Indonesia's foreign policy principles and its constitution—given that Indonesia has confirmed its membership in the body. This is a normative or doctrinal legal study characterized by a normative-descriptive approach. The study employs statutory, conceptual, and comparative approaches, all grounded in secondary data sources. These secondary data comprise three categories of legal materials: primary, secondary, and tertiary. Data were collected through a literature review and analyzed using legal interpretation methodologies. The analysis yields a systematic understanding of the comparison and normative relevance between the subjects of study: the Board of Peace Charter and the "independent and active" foreign policy principle. The comparative analysis involves contrasting the two subjects and examining their respective weaknesses and shortcomings. Meanwhile, the analysis of relevance explores the relationship between the Board of Peace Charter and the 1945 Constitution, as well as the implications of Indonesia's participation in the Board of Peace under that constitutional framework.

Keywords: *Board of Peace, Principle of Independent and Active, International Law, Indonesian Constitution*